



B A B

III

# MEMBANGUN POSYANDU MANDIRI





MEMBANGUN POSYANDU MANDIRI





## MEMBANGUN POSYANDU MANDIRI

**U** NTUK menghadapi tantangan globalisasi dengan pameran kehidupan yang “modern” dan “individualistik” diperlukan upaya untuk membangkitkan kembali rasa persatuan dan kesatuan yang diarahkan untuk saling peduli terhadap sesama anak bangsa. Upaya itu nampaknya tidak bisa hanya berupa wacana dan anjuran, tetapi harus dimunculkan dengan contoh-contoh nyata yang bisa dengan mudah ditiru dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengikuti anjuran Presiden SBY untuk menyegarkan kembali kehidupan gotong royong di tingkat pedesaan berupa contoh-contoh nyata yang bisa dilakukan dengan mudah, bersama-sama oleh organisasi dan para pemimpin di pedesaan. Organisasi itu disebut Posyandu yang dikelola oleh masyarakat dengan dukungan lembaga-lembaga pemerintah terkait.



Organisasi Posyandu tersebut berfungsi membantu keluarga memahami banyak kegiatan yang ditawarkan pemerintah untuk akhirnya menjadi kekuatan keluarga memberdayakan anggotanya. Posyandu dimasa lalu dan dimasa depan harus bergerak secara konsisten, peduli dan memihak keluarga kurang beruntung.

Umumnya visi yang diambil suatu Posyandu sangat sederhana, yaitu membangun kebersamaan untuk membangun manusia dengan

menempatkan keluarga, terutama keluarga kurang mampu, sebagai titik sentral pembangunan. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang sebenarnya mempunyai peranan yang sangat penting. Keluarga adalah wahana pertama dan utama dalam pembangunan anggotanya, dan dengan demikian keluarga adalah wahana pembangunan bangsa. Namun, karena di banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia, kondisi keluarga umumnya sangat lemah, tingkat pendidikan pemimpin dan anggotanya rendah, keadaan kesehatannya kurang terawat, dan mempunyai kondisi ekonomi yang juga rendah, maka latihan gotong royong itu harus sekaligus merupakan upaya untuk memberdayakan keluarga.

Oleh karena itu di hampir semua desa di Indonesia perlu segera dikembangkan upaya *pembangunan terpadu yang ditujukan untuk memperkuat peran dan fungsi keluarga* sebagai unit terkecil dalam masyarakat agar keluarga dapat menjadi kekuatan pembangunan yang berorientasi pada manusia. Dengan dukungan pada kemampuan lingkungan dan kemampuan wirausaha yang peduli terhadap sesama anak bangsa, maka keluarga diharapkan dapat melaksanakan fungsinya membangun anak bangsa. Keluarga dapat menjadi wahana pembangunan bangsa.

Upaya pembangunan keluarga dengan tujuan tersebut dimasa lalu diarahkan pada pembinaan dan pengembangan keluarga yang disebut *Tri Bina*, yaitu *Bina Manusia, Bina Lingkungan dan Bina Wirausaha*. Pada masa reformasi pembangunan dengan pendekatan *Tri Bina* mendapat kritik dan disempurnakan dengan menyebutnya sebagai pembangunan dengan pendekatan *Tri Daya*, yaitu *Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Lingkungan dan Pemberdayaan Kemampuan Wirausaha*.

Program-program pemberdayaan tersebut menempatkan manusia, melalui pemberdayaan keluarga, sebagai titik sentral pembangunan. Karena orientasinya pada pemberdayaan manusia, maka sejak adanya kesepakatan PBB pada tahun 2000, program yang semula berorientasi pada peningkatan *Kualitas Manusia* atau *Human Development* dengan meningkatkan *Human Development Index (HDI)* lebih ditingkatkan lagi. Pembangunan tersebut muncul sebagai pembangunan yang berorientasi pada pencapaian *Millenium Development Goals (MDGs)*. Sejak tahun 2005 *MDGs* tahun 2000 tersebut disegarkan menjadi komitmen baru dengan isi yang diperluas dan jangka waktu pencapaian sasaran yang lebih tegas.

Di Indonesia komitmen baru tersebut telah ditindak lanjuti oleh pemerintah. Dengan demikian semua komponen pembangunan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakannya. Kita semua, terutama pemerintah di segala tingkatan, tidak terkecuali pemerintah daerah, diharapkan mengajak semua kekuatan pembangunan agar secara gotong royong dapat menyelesaikan target-target yang telah disepakati dengan mulus dan mengantar seluruh anak bangsa meraih mutu yang memadai agar bisa mencapai kesejahteraan yang optimal secara demokratis dan mandiri.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak dilantik telah menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap upaya membantu masyarakat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraannya. Dalam berbagai kesempatan Presiden juga menyerukan agar dilakukan *penyegaran Posyandu*.

Menurut konsep baru tersebut, *Posyandu* menempatkan *manusia sebagai titik sentral pembangunan*. *Posyandu* diarahkan untuk mampu

memperkuat fungsi keluarga agar akhirnya setiap keluarga bisa menjadi wahana pembangunan anak bangsa. Karena itu Posyandu harus pertamanya mempunyai kemampuan yang tinggi sesuai dengan arahan fungsi keluarga sebagai kelompok yang besar dan kuat. Fungsi-fungsi tersebut dibawah ini seyogyanya segera dikuasai Posyandu untuk secara bertahap diarahkan sebagai pendukung upaya pemberdayaan keluarga.

Seperti diketahui, fungsi-fungsi keluarga menurut UU nomor 10 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah tahun 1994 meliputi, *Fungsi Keagamaan*, dimana *Posyandu* diharapkan merangsang keluarga untuk mampu menjadi wahana pertama dan utama untuk membawa seluruh anggotanya melaksanakan ke Tuhanan Yang Maha Esa dengan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

*Fungsi Kebudayaan*, dimana *Posyandu* diharapkan memberdayakan keluarga menjadi wahana untuk melestarikan budaya nasional yang luhur dan bermartabat.

*Fungsi Cinta Kasih*, dimana *Posyandu* menyiapkan keluarga menjadi wahana yang pertama dan utama untuk menumbuhkan cinta kasih antar sesama anggotanya, antar orang tua dan dengan pasangannya, antara anak dengan orang tuanya, dan antara sesama anak-anak sendiri.

*Fungsi Perlindungan*, dimana *Posyandu* membantu keluarga menjadi pelindung yang utama dan kokoh dalam memberikan kebenaran dan keteladanan kepada anak-anak dan keturunannya.

*Fungsi Reproduksi*, dimana *Posyandu* mengembangkan keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana,

sehingga anak-anak bangsa ini dapat dihasilkan dengan kualitas yang prima karena anak-anak kita dikemudian hari adalah anak Indonesia yang handal.

*Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan*, dimana *Posyandu* membantu keluarga berfungsi sebagai sekolah dari guru yang pertama dan utama dalam mengantarkan anak-anaknya untuk menjadi panutan masyarakat luas dan dirinya sendiri.

*Fungsi Ekonomi*, dimana *Posyandu* membantu keluarga menyiapkan dirinya untuk menjadi suatu unit yang mandiri dan sanggup meningkatkan kesejahteraan lahir dan batinnya dengan penuh kemandirian dan kesanggupan yang membanggakan.

*Fungsi Pemeliharaan Lingkungan*, dimana *Posyandu* membantu keluarga siap dan sanggup untuk memelihara kelestarian lingkungan untuk memberikan yang terbaik kepada anak cucunya dimasa yang akan datang.

Kedelapan fungsi keluarga yang dikembangkan melalui *Posyandu* tersebut, harus membudaya terlebih dahulu dalam lingkungan *Posyandu*. Proses ini diperlukan, terutama sebelum setiap keluarga mendapat pemberdayaan dan dukungan dari *Posyandu* agar mampu menjalankan fungsi-fungsi itu secara mandiri. Apabila *Posyandu* mampu menghayati fungsi-fungsi tersebut, dan selanjutnya menjadikannya sebagai program untuk memberdayakan keluarga secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan pada akhirnya setiap keluarga bisa menjadi keluarga sejahtera. Apabila setiap keluarga bisa berkembang menjadi keluarga yang mandiri, sejahtera dan dinamis,

maka keluarga tersebut akan mampu berkembang menjadi wahana pembangunan bangsa.

Atas dasar uraian diatas, *Posyandu* masa depan harus secara sadar dikembangkan untuk pertama-tama menjadi *wahana pembangunan* yang sekaligus mengantar pemberdayaan keluarga agar mampu mengembangkan berbagai fungsi utamanya. Dengan demikian *Posyandu* sebagai lembaga masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sebagai wadah pengemblengan keluarga di tingkat RT, RW atau pedesaan, yang pada akhirnya harus bisa memberdayakan keluarga agar setiap keluarga makin mandiri. Untuk itu *Posyandu* harus mampu mengambil oper menjalankan fungsi-fungsi keluarga dalam kapasitas rangkap. Artinya menggantikan fungsi keluarga dengan kesiapan untuk menghindar apabila keluarga yang bersangkutan mampu menjalankan fungsinya secara mandiri.

Seperti juga falsafah kita "*ing ngarsa sun tulodo*", artinya "*di depan memberi contoh*", *Posyandu* pertama-tama mengganti peran keluarga, tetapi segera menyerahkan kembali manakala keluarga sudah siap. Karena pendekatannya bersifat menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan, dengan sendirinya peran yang dijalankannya adalah peran pemberdayaan keluarga dalam bidang kesehatan, pendidikan dan wirausaha serta lainnya, mulai dari anak dalam janin sampai lansia. Dalam bidang kesehatan, contohnya, *Posyandu* bisa mulai sebagai lembaga pemberdayaan ibu hamil.

Dalam upaya ini *Posyandu* melakukan kegiatan pemeriksaan dan pembinaan Ibu hamil dan melahirkan, meningkatkan pengetahuan dan pemeliharaan gizi dan kesehatan umum lainnya, menjadi sarana

pemeliharaan kandungan, menyediakan petunjuk olah raga dan keperluan lain yang akhirnya harus disediakan oleh keluarga dan anggotanya.

Dalam *bidang pendidikan*, pada saat yang sangat dini Posyandu bisa menyediakan fasilitas untuk pengembangan kebiasaan membaca dan usaha lain yang merangsang pertumbuhan janin sesuai dengan kemajuan jaman. Posyandu bisa membantu menyiapkan keluarga untuk bekerja keras agar bisa membantu anaknya untuk sekolah secara dini dan bergaul dengan bebas bersama anak sebaya lainnya.

Dalam *bidang wirausaha*, pada tingkat anak masih dalam kandungan, Posyandu bisa menyediakan diri sebagai wahana untuk memahami adanya kesempatan wirausaha bagi keluarga yang anggotanya sedang hamil agar mampu mandiri sehingga bisa memberi makanan yang lebih baik kepada ibu hamil dan melahirkan yang ada dalam keluarganya.

Begitu juga untuk usia remaja dan dewasa, banyak kegiatan dapat dilakukan oleh keluarga secara gotong royong dalam Posyandu. Bahkan, Posyandu masih juga bisa berperan untuk penduduk lanjut usia yang jumlahnya meledak. Posyandu mempunyai peran pemberdayaan Keluarga Lansia. Keluarga dengan anggota lansia atau keluarga lansia yang bergabung dalam Posyandu dapat memberi dukungan moral dan nilai-nilai luhur yang diperlukan oleh generasi muda yang ada. Sebaliknya Posyandu dapat membantu lansia dari keluarga kurang mampu untuk memperingan masalah kesehatan yang mereka hadapi, masalah pengetahuan tentang perkembangan masyarakat yang terjadi, dan dapat pula membantu pengembangan ekonomi dengan menjaga

kehidupan yang tenteram diantara warga yang ada. Kelompok Lansia dalam Posyandu biasanya bisa berfungsi ganda, disatu pihak untuk anggotanya, dan di pihak lain anggota Posyandu yang lansia dapat memberi dukungan terhadap masalah-masalah moral atau pengalaman masa lalu yang tidak pernah dialami oleh anggota Posyandu yang lebih muda. Poyandu lansia dapat menjadi ajang untuk bekerja sama diantara para lansia sehingga mereka mempunyai kegiatan bersama yang mengasyikkan. Para lansia dapat menjadi panutan untuk generasi yang lebih muda.

Sangat membesarkan hati bahwa upaya-upaya diatas mulai dikembangkan kembali di Jakarta, Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan daerah-daerah lainnya. Beberapa waktu lalu Presiden SBY dan Ibu Negara menyempatkan diri melihat pengembangan Posyandu di daerah Pacitan. Semoga pengembangan di daerah yang relatif miskin ini memberi makna bahwa keluarga yang muncul dan dibina oleh Posyandu yang makin mandiri dan berkembang menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.

[

## Presiden Peduli Kesehatan Masyarakat

### *Reportase HU Pelita Edisi April 2006*

*P*RESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono meneteskan vaksin polio kepada Weka Nayotama Zayan, bayi berusia tiga bulan, di pendopo Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Penetasan vaksin tersebut sekaligus menandai dimulainya Pekan Imunisasi Nasional (PIN) putaran ke-5 yang berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia. Selain Presiden, penetasan vaksin polio juga dilakukan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono kepada Yuka Maulinda Apriliana, bayi berumur 1 tahun, di tempat yang sama. Selama acara penetasan vaksi polio oleh Presiden dan Ibu Negara itu berlangsung puluhan anak-anak sekolah taman kanak-kanak melantunkan lagu "Aku Anak Sehat" dan lagu "Balonku" dengan iringan musik instrumental.

Secara keseluruhan, Kabupaten Pacitan menyediakan 798 pos PIN yang tersebar pada 164 desa/kelurahan untuk melayani penetasan vaksin polio kepada

*balita, yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 37.000 anak.*

*Sementara itu, Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari di Pendopo Kabupaten Pacitan, menyatakan putaran kelima pemberian vaksin polio itu dilaksanakan karena virus polio liar diduga masih berada di sekitar masyarakat dan mengancam balita yang belum diimunisasi.*

*“Walaupun kita beberapa kali telah berhasil melaksanakan PIN dengan baik dan telah berhasil menurunkan jumlah penderita lumpuh layuh akibat infeksi virus polio liar, namun kita harus terus berpacu dan, berusaha untuk memutuskan mata rantai penularan infeksi virus polio liar sampai tuntas dengan memberikan kekebalan kepada anak-anak balita,” ujanya.*

*Ia menuturkan, upaya pemutusan mata rantai penularan infeksi virus polio liar selama ini belum cukup. Hingga Februari 2006 jumlah penderita akibat virus polio liar secara kumulatif telah mencapai 305 anak yang tersebar di 10 propinsi dan 48 kabupaten/kota.*

*Penderita terakhir dilaporkan terjadi pada tanggal 15 Januari 2006 di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dan pada 20 Februari di Aceh Tenggara, NAD. Pekan Imunisasi Nasional tahun 2005 telah dilaksanakan dengan cukup sukses dengan hasil 95 persen balita pada putaran pertama; 97,4 persen pada putaran kedua, 98,1 persen balita pada putaran ketiga; dan 97,4 persen pada putaran ke-empat.*

*Sasaran PIN kelima berjumlah 23.626.795 yang tersebar pada 33 propinsi di Indonesia dengan vaksin yang dibutuhkan sebanyak 66.261.500 dosis. Menkes berharap PIN kelima akan menjadi PIN terakhir yang akan mengantarkan Indonesia memperoleh “Sertifikat Indonesia Bebas Polio”.*

### ***Perhatikan pesantren***

*Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono meresmikan Community Access Point (CAP) di Perguruan Islam Pondok Tremas, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. CAP dibentuk untuk memperluas wawasan para santri dan guru di bidang teknologi informasi.*

*Dengan fasilitas CAP tersebut, para santri dan guru dapat memperluas wawasan mereka dengan mengakses informasi melalui Internet dan diharapkan dapat meningkatkan keahlian di bidang Teknologi Informasi dengan menggunakan fasilitas komputer yang tersedia.*

*Selain program tersebut juga disediakan piranti lunak aplikasi dan pelatihan kepada 15 orang santri yang didedikasikan sebagai pelatih bagi para santri lainnya dalam program pelatihan untuk pelatih (Train Of Trainers).*



Program pelatihan itu akan dilaksanakan selama 2 kali dalam kurun waktu 6 bulan. “Kami sangat antusias bergabung bersama pemain TI lainnya untuk mendukung pemerintah dalam mengurangi kesenjangan digital di Indonesia,” Kata Tony Chen, Presiden Direktur PT Microsoft Indonesia.

“Program ini merupakan bagian dari visi kami untuk meningkatkan potensi setiap orang melalui Teknologi Informasi.” jelasnya. Program ini merupakan bagian dari inisiatif global Microsoft yang bertajuk Unlimited Potential (Potensial tak terbatas/UIP) dimana Microsoft bekerjasama dengan berbagai lembaga nirlaba menyediakan sarana pembelajaran jangka panjang bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan.

Microsoft akan melanjutkan dukungannya dalam bentuk donasi piranti lunak kepada delapan CAP lainnya yang akan dilaksanakan di delapan kabupaten yaitu Pacitan, Trenggalek, Bondowoso, Madiun, Situbondo, Wonogiri, Banjarnegara, dan Rembang. Program UIP di Indonesia pertama kali diluncurkan di Indonesia tanggal 23 Oktober 2003, merupakan bagian dari inisiatif global.

Tujuan utama program UIP adalah untuk mengurangi kesenjangan digital bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dengan menyediakan sarana pelatihan dan pembelajaran jangka panjang melalui pembentukan Community Training and Learning Centre (CTLC), yang dikelola lembaga non-profit untuk masyarakat. **(oto/djo)**

[



## KOORDINASI GERAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN

**S**AYA disertai oleh Siswadi, MSc, Dr. Rohadi Hariyanto, Wakil dari Yayasan Damandiri dr. Loet Affandi dan Drs. Mulyono Daniprawiro, MM., serta wakil dari Yayasan Indra, Drs. Sudarmadi, telah diterima secara khusus untuk koordinasi program pengentasan kemiskinan oleh Menko Kesra RI, Ir. Aburizal Bakrie di kantornya. Menko Kesra didampingi lengkap oleh Sesmenko Kesra, Drs. Sutedjo Yuwono, Deputi Menko Kesra, Dr. Ir. Sudjana, serta staf Kantor Menko Kesra lainnya. Pertemuan koordinasi itu secara khusus membicarakan program kerja dan langkah-langkah yang sedang diambil oleh pemerintah, kemungkinan kerjasama dengan kegiatan-kegiatan yang sedang dipersiapkan oleh lembaga-lembaga sosial yang bernaung dalam Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) di tingkat pusat, BK3S di tingkat Propinsi dan K3S di tingkat Kabupaten atau Kota.

Menko Kesra secara terperinci menjelaskan langkah-langkah strategis dalam menggali kebutuhan dan kekhususan daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan berbagai pendekatan. Menko menjelaskan komitmen dan penyediaan anggaran yang sangat besar dan sedang dikoordinasikan antar Departemen dan Instansi untuk pengentasan kemiskinan. Anggaran tahun 2005 yang cukup besar, tahun ini, 2006, akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Karena anggaran yang cukup besar dan selalu bertambah besar setiap tahunnya itu, maka Kantor Menko Kesra bersama dengan Departemen dan Instansi lainnya secara berturut-turut mengadakan Rancangan Pertemuan di berbagai propinsi agar anggaran yang tersedia tidak saja dipergunakan secara efisien tetapi juga dapat menjawab kebutuhan dan kekhususan daerah dengan tepat.

Setelah pertemuan yang diselenggarakan di Manado, kemudian disusul pertemuan lain di Yogyakarta dan kemudian untuk wilayah Sumatra di Palembang. Pertemuan regional itu diikuti oleh stakeholders yang luas sehingga kepentingan dan kekhususan daerah dapat didengar, ditampung dan menjadi bagian dari strategi nasional yang diharapkan dipergunakan untuk mengembangkan pendekatan yang paling tepat dalam upaya maha besar memotong rantai kemiskinan.

Hasil masukan dari berbagai pertemuan regional itu menjadi bahan yang sangat berharga dalam menyusun strategi nasional yang dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan dengan tegas memotong rantai kemiskinan sampai ke akar-akarnya. Strategi nasional itu akan menjadi andalan yang tidak saja menggarap masalah secara nasional, tetapi juga mempunyai kekhususan karena digarap dengan memberi perhatian yang tinggi terhadap variasi daerah yang beragam.

Serempak dengan upaya pemerintah melakukan kegiatan yang anggarannya di sediakan di berbagai Kementerian dan Instansi lain, di pusat dan di daerah, serta upaya besar menyusun strategi nasional tersebut diatas, DNIKS dan berbagai lembaga lainnya, untuk beberapa waktu terakhir ini telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di daerah pedesaan menanggapi seruan Presiden RI untuk Revitalisasi dan Pengembangan Posyandu. Upaya besar dilakukan dengan memberi dukungan perbaikan mutu dan penyebaran pelayanan oleh tenaga bidan di pedesaan. Pelayanan bidan yang biasanya dilakukan oleh para bidan di desa, karena satu dan lain hal, sempat terhenti dan berkurang. Posyandu yang biasanya dilayani oleh bidan di desa sebagian juga berhenti atau mengendor.

Pemerintah Daerah, PKK dan organisasi sosial kemasyarakatan lain di berbagai propinsi dan kabupaten/kota telah mengambil prakarsa melaksanakan petunjuk Presiden tentang Revitalisasi dan Pengembangan Posyandu, termasuk upaya untuk menyegarkan penggarapan Program KB dan upaya-upaya lain untuk meningkatkan delapan fungsi utama keluarga yang diperlukan menuju keluarga yang bermutu, sejahtera, dan mandiri. Ketua Umum DNIKS melaporkan juga bahwa anggota DNIKS sudah juga siap untuk menggelar pertemuan nasional untuk menyamakan langkah dan menggalang komitmen politik yang lebih gegap gempita.

Dilaporkan pula bahwa langkah-langkah awal menuju pertemuan nasional itu telah digalang bersama pemerintah daerah di Jawa Timur, di Jawa Tengah dan di DI Yogyakarta. Hal serupa juga telah dilakukan dengan beberapa Kabupaten dan Kota. Disamping itu juga diadakan pertemuan dengan berbagai organisasi profesi seperti Ikatan Bidan

Indonesia (IBI) dan lembaga lain yang terkait dengan upaya pengembangan kemandirian bagi Posyandu di pedesaan. Bank-bank Pembangunan Daerah atau BPD, Bukopin dan BPR yang selama ini bekerja sama dengan Yayasan Damandiri diikuti sertakan pula sebagai pendukung untuk kegiatan Posyandu Mandiri di pedesaan.

Selama bulan Mei 2006 lalu, di berbagai daerah diadakan pertemuan yang diikuti oleh instansi, lembaga dan organisasi sosial terkait untuk memudahkan semua pihak menyatukan pengertian dan langkah membantu masyarakat dalam menggalang kekuatan untuk penyegaran dan pengembangan Posyandu yang mandiri dan berkelanjutan. Pertemuan itu menjadi forum untuk membandingkan pengalaman melaksanakan berbagai langkah pelayanan kepada masyarakat umum yang luas dan berkelanjutan. Atas dasar pengalaman itu diharapkan seluruh daerah dapat menyumbang masukan untuk saling dibandingkan agar yang terbaik dapat dipadukan sebagai paket Posyandu Mandiri secara nasional.

Dilaporkan pula langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan bidan, termasuk upaya bersama dalam memperluas jangkauan pelayanan sampai ke setiap desa di daerah-daerah yang dianggap strategis. Upaya ini dilakukan bersama Ikatan Bidan Indonesia dan berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan swasta yang bekerja sama dalam rangka pengembangan SDM untuk pembangunan pedesaan.

Menanggapi usaha yang mulai menunjukkan hasil-hasilnya tersebut, Menko Kesra memberi petunjuk agar di pedesaan dikembangkan semangat *entreprenur* yang dinamik dan berjangkauan

luas. Begitu juga dikembangkan semangat bekerja keras, memihak masyarakat dan keluarga kurang mampu, karena sesungguhnya mereka tidak perlu harus membuat usaha-usaha yang merugi. Kaum marginal bisa saja menciptakan produk dan atau usaha yang bisa membawa keuntungan yang besar. Lebih dari itu upaya itu sekaligus memberi manfaat yang luas kepada keluarga atau penduduk yang tertinggal.

Menko Kesra memberi petunjuk pula agar upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai lembaga swasta dan organisasi masyarakat tersebut dikoordinasikan dengan Kantor Menko serta lembaga-lembaga pemerintah yang selama ini telah bekerja keras untuk memberi pelayanan kepada keluarga kurang mampu. Menko Kesra juga menawarkan kemungkinan keterpaduan upaya yang sedang dilaksanakan bersama dengan upaya besar lain yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga dicapai sinergi yang menguntungkan keluarga kurang mampu serta masyarakat lain pada umumnya.

Menanggapi ajakan Menko Kesra yang simpatik itu, saya selaku Ketua Umum DNIKS merasa sangat berbahagia dan sekaligus menyetujui bahwa Rancangan Pertemuan Nasional untuk Penyegaran dan Pengembangan Posyandu tersebut diprakarsai oleh Menko Kesra dengan dukungan dari DNIKS dan seluruh anggotanya, serta dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan PKK-nya sebagai tuan rumah di Jakarta. Tindak lanjut dari rancangan ini segera ditangani oleh para Deputi di lingkungan Kantor Menko Kesra dan organisasi atau lembaga terkait lainnya.

Sementara itu telah digelar pula pemaparan Posyandu Mandiri di lapangan di Kabupaten Magetan yang menunjukkan bahwa upaya

memperluas peran Posyandu Mandiri sebagai wahana pengembangan manusia bisa dijalankan oleh masyarakat desa yang mendapat pendampingan yang simpatik dari berbagai aparat pemerintah daerah. Lembaga sosial kemasyarakatan lain yang ada di sekitar daerah pedesaan dapat ikut serta memberi kontribusi dan bersinergi secara terpadu sehingga masyarakat banyak, khususnya keluarga kurang mampu, dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi secara terhormat.

Gelar Posyandu Mandiri di Magetan itu diikuti acara serupa di berbagai daerah, termasuk di Lampung dan Bengkulu, dimana pemerintah daerah bersama Yayasan Damandiri bersama-sama akan mengembangkan upaya pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan keluarga sejahtera yang bersifat paripurna. Upaya-upaya itu diharapkan diikuti partisipasi yang tinggi oleh keluarga pedesaan sebagai upaya pemberdayaan keluarga sejahtera. Pemberdayaan ini dikembangkan melalui Posyandu yang mandiri, yang akan membawa angin segar bagi kegiatan Posyandu di lapangan, menampung partisipasi masyarakat yang luas dan berkelanjutan.

[



## Pengembangan Posyandu Mandiri ke 14 Provinsi dan 100 Kabupaten/Kota

### *Reportase Majalah Gemari Edisi 65/VII/2006*

*D*alam Posyandu, proses pemberdayaan tidak saja dilakukan para petugas dinas atau petugas resmi pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat secara luas. Mereka saling belajar dari tetangganya sehingga perubahan sikap dan tingkah laku tidak sulit karena tidak harus menghafal teori tetapi langsung mendalaminya melalui praktek sederhana dengan meniru keluarga lain yang telah berhasil. Pendekatan-pendekatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di pedesaan harus sangat memperhatikan bagian terbesar dari piramida dan dikembangkan menjadi komunitas-komunitas entrepreneur di mana Menko Kesra juga telah bersepakat menjadi vocal point yang menjadi pertemuan nasional pada bulan Juni ini.

Demikian antara lain gagasan brilian yang disampaikan Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNI-KS), Prof Dr H

*Haryono Suyono kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Ir Aburizal Bakrie, di kantor kementerian Kesra, beberapa waktu lalu.*

*Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam yang membahas sasaran program perkuatan Posyandu sebagai basis pembangunan melalui pemberdayaan keluarga, Haryono Suyono didampingi beberapa pengurus DNI-KS dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri).*

*Sesuai visi dan misi yang diemban Yayasan Damandiri dan DNI-KS beserta mitra kerjanya sejalan dengan apa yang akan dikembangkan kantor Kementerian Kesra serta pemerintah daerah. "Dan ini merupakan upaya sinkronisasi rancangan besar upaya pengentasan kemiskinan masyarakat dan pemberdayaannya di tingkat grass road," kata Haryono Suyono. "Penggarapan, penyegaran dan pengembangan posyandu akan dilakukan melalui pendekatan yang praktis, pragmatis dan ekonomis," ujar Aburizal Bakri.*

*Adapun sasarannya, jelas Haryono Suyono adalah Posyandu-posyandu yang saat ini telah berdiri di Jakarta dan tumbuh sebanyak 4000 buah yang dikembangkan Gubernur DKI Sutiyoso serta Ketua Tim Penggerak PKK beserta timnya. Nantinya pengembangan posyandu Mandiri akan dilanjutkan ke 14 provinsi dan 100 kabupaten/kota pada tingkat awal.*

*Sementara untuk pendanaannya, kata Ketua Umum DNI-KS yang juga Wakil Ketua I Yayasan Damandiri, karena kegiatan ini merupakan bagian yang terintegrasi maka berasal dari pemerintah serta melibatkan partisipasi pengusaha agar jangan melihat ini hanya sebagai corporate responsibility tetapi juga melihatnya sebagai kesempatan untuk menghasilkan sesuatu yang tingkat responsibilitynya tinggi dan menguntungkan perusahaan serta masyarakat luas.*

### *Tanggung jawab*

*Dalam Posyandu, menurut Haryono Suyono, proses pemberdayaan itu tidak saja dilakukan oleh para petugas dinas, atau petugas resmi pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat secara luas. Mereka saling belajar dari tetangganya sehingga perubahan sikap dan tingkah laku tidak sulit karena tidak harus menghafal teori tetapi langsung mendalaminya melalui praktek sederhana dengan meniru keluarga lain yang telah berhasil.*

*Masih menurut Ketua Umum DNI-KS ini, Posyandu yang umumnya dikelola oleh PKK dengan dukungan petugas PLKB dari jajaran Dinas KB dan para bidan dari jajaran Dinas Kesehatan, akan dikembangkan dengan mengundang atau mempersilahkan lembaga-lembaga lain seperti organisasi sosial kemasyarakatan yang bernaung dalam Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) di tingkat Propinsi, Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) di tingkat Kabupaten, atau lembaga lain yang mempunyai kemampuan profesional untuk ikut terjun langsung dalam bidang-*



*bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan keluarga dalam lingkungan Posyandu. Mereka diharapkan dapat membantu memberikan dukungan dan bantuan pencerahan dalam bidang-bidang masing-masing.*

*“Organisasi sosial yang biasanya mengasuh para penyandang masalah sosial kemasyarakatan melalui Panti atau organisasi yang diasuhnya dengan baik, diharapkan siap mengirim petugasnya untuk meningkatkan kesadaran dan kemahiran anggota Posyandu untuk mampu mendeteksi anak-anak balita, anak remaja atau penduduk lanjut usia yang mungkin saja mempunyai masalah sosial,” ujarnya seraya menambahkan, “para petugas lembaga sosial itu harus pula bisa mengajarkan keluarga yang menjadi anggota Posyandu untuk sebisa mungkin menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi keluarganya secara mandiri”.*

*Memang, kata Menko Kesra dan Taskin era Presiden BJ Habibie ini, pendekatan kegiatan dalam Posyandu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Pasalnya, biasanya sebuah keluarga yang mempunyai anggota dengan masalah sosial, seperti cacat atau ada kekurangan fisik, akan cenderung bersifat tertutup. Sikap ini dilakukan untuk menghindari rasa malu atau bersalah, dan biasanya tidak ingin ditolong keluarga lain secara terbuka.*

*“Untuk menerima pertolongan biasanya memerlukan kesabaran dan pengertian yang luas sampai keluarga itu merasa yakin bahwa pertolongan yang akan diterimanya itu dilakukan semata-mata sebagai upaya gotong royong jauh dari sifat mempermalukan sesamanya,” katanya. **HAR***



## MEMECAHKAN MASALAH RAKYAT DI LAPANGAN

**S**ecara maraton Pimpinan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang terdiri dari saya selaku Ketua Umum, Ketua, Drs. Maskub Istianto, Sekjen dan Sekretaris, Ibu Wahyu Setiowati dan Dr. Rohadi Hariyanto, Koordinator Daerah, Drs. Sumartono, disertai Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) DI Yogyakarta, Drs. Harsoyo, Direktur Utama BPD Jateng, Drs. Hariyono, dan Kepala Cabang Bank Bukopin Jateng Drs. Adil Syahputra, telah diterima dan mengadakan rapat khusus untuk menyegarkan dan mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) bersama Pimpinan Pemerintah Daerah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dari pihak Pemda DI Yogyakarta hadir Wakil Gubernur DI Yogyakarta, Paku Alam X dengan jajarannya, antara lain Asisten Kesra, Dinas Kesehatan, Dinas KB, Dinas Sosial, serta Dinas terkait lainnya. Dari Pemda Jawa Tengah

hadir Wakil Gubernur Jawa Tengah, Drs. Ali Mufiz, MPA, Dinas Kesehatan, Karo Kesra, dan dinas terkait lainnya. Hadir pula wakil-wakil dari berbagai perguruan tinggi setempat.

Pertemuan maraton itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan dua hari itu, Presiden yang didampingi oleh sedikitnya sepuluh Menteri, telah menyaksikan antara lain gelar Posyandu di lapangan yang menggambarkan kemampuan lembaga masyarakat itu sebagai wahana pemberdayaan keluarga dalam berbagai dimensi. Delapan fungsi keluarga yang dirumuskan dalam UU nomor 10 tahun 1992 dengan sederhana dapat dikembangkan oleh Posyandu untuk kemudian disampaikan kepada keluarga anggota Posyandu agar setiap Kepala Keluarga mampu berperan sebagai orang tua yang bijaksana dalam memberdayakan anak-anak dan anggota keluarga lainnya.

Keluarga yang semestinya berperan dalam bidang keagamaan, kebudayaan, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan pemeliharaan lingkungan, melalui pemberdayaan yang berkelanjutan diharapkan dapat memainkan peran yang makin sempurna. Keluarga yang kurang mengerti perannya, melalui pergaulan yang erat dalam Posyandu, bisa mempelajari peran yang dimainkan oleh keluarga lain yang secara kebetulan lebih baik dari peran yang bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan keseharian. Kerjasama antar keluarga dalam pemahaman peran itu diwujudkan secara sederhana melalui contoh nyata dari sikap, tingkah laku dan kegiatan yang oleh keluarga dalam kelompok yang berkumpul secara teratur. Pemberdayaan peran dengan contoh-contoh model tersebut mempermudah keluarga sederhana di pedesaan meniru atau

memperlajari peran-peran yang secara teoritis sulit dan memerlukan waktu yang lama. Dengan contoh-contoh sederhana keluarga biasa di pedesaan dapat memainkan peran yang dicontohkan dalam waktu yang relatif singkat.

Posyandu dalam pengertian lama mempunyai ciri untuk KB dan Kesehatan, sehingga Posyandu hampir identik dengan penimbangan balita, pemeriksaan ibu hamil dan pertolongan untuk ikut KB dengan pemeriksaan ulang atau partisipasi KB untuk pertama kali. Dengan demikian pemberdayaan yang selama ini telah banyak dilakukan dengan baik oleh Kader-kader PKK di pedesaan adalah pemberdayaan dalam pemahaman KB dan Kesehatan, utamanya pemahaman tentang hidup sehat bagi keluarga dengan anak balita atau keluarga yang sedang mengandung.

Karenanya, menurut Wakil Gubernur DI Yogyakarta Paku Alam X, maupun Wakil Gubernur Jawa Tengah, Drs. Ali Mufiz, MPA, yang didukung oleh hampir seluruh stafnya, jaringan pemberdayaan dalam bidang KB dan Kesehatan untuk lembaga Posyandu hampir sempurna. Demikian juga sistem pendukung kelembagaan rujukan untuk bidang KB dan Kesehatan berupa klinik, rumah sakit, dan lembaga konsultasi untuk kedua bidang itu, hampir sempurna. Kekurangan yang terjadi, akibat proses desentralisasi yang belum sempurna, adalah intensitas aktifitas yang dalam lima tahun terakhir ini mengendor. Karena itulah instruksi Presiden agar Posyandu disegarkan dan dikembangkan, merupakan tantangan yang harus segera ditindak lanjuti dengan sungguh-sungguh. Apabila Posyandu tidak disegarkan dan dikembangkan, dikawatirkan partisipasi masyarakat dalam menolong warganya akan terhambat, dan akibatnya, kepincangan dalam kedua

bidang itu akan berakibat fatal.

Di Yogyakarta dan hampir di seluruh daerah di Jawa Tengah, dukungan klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit telah dapat memberikan jaminan kepada keluarga kurang mampu untuk memperoleh pelayanan KB dan Kesehatan secara gratis. Di Jawa Tengah pemerintah daerah telah mampu pula membentuk klinik-klinik desa atau Polindes yang dilengkapi bidan untuk memberikan bantuan dan pelayanan dalam kesehatan dasar. Polindes yang berkembang menjadi Poliklinik Kesehatan Desa atau PKD akan merujuk penduduk yang tidak dapat ditangani di pedesaan ke klinik Puskesmas di Kecamatan atau Rumah Sakit dengan pelayanan yang lebih lengkap di tingkat kabupaten atau kota atau ke propinsi sesuai dengan sistem rujukan yang telah dikembangkan.

Pelayanan berjenjang itu telah dikembangkan dengan maksud agar akses terhadap kesehatan bagi setiap penduduk menjadi lebih mudah dan memungkinkan hidup lebih sehat dan umur penduduk yang lebih panjang. Di kedua propinsi itu pelayanan dan pemberdayaan keluarga dan penduduk dalam fungsi-fungsi keluarga lainnya belum serapi yang telah dikemas dalam bidang KB dan kesehatan. Pendekatan yang selama ini dikerjakan dengan baik, umumnya bersifat pendekatan institusional, yaitu pendekatan dalam pelayanan yang dilakukan oleh, atau melalui, lembaga, panti-panti atau pelayanan melalui organisasi sosial yang bergerak dalam bidang masing-masing.

Pelayanan dalam bidang pendidikan misalnya, dilakukan bukan dengan dorongan yang sama kuatnya bagi setiap anak dalam setiap keluarga. Orang tua yang sangat peduli terhadap masa depan anaknya,

mampu dan mempunyai harapan yang tinggi terhadap hasil pendidikan bagi anak-anaknya, akan berusaha mengirim anak-anaknya ke sekolah. Tetapi keluarga yang tidak yakin akan manfaat pendidikan untuk anak-anaknya, karena kurang mampu, atau karena alasan lain, akan menahan dan tidak mengirim anak-anaknya ke sekolah. Mereka akan memanfaatkan anak-anaknya untuk membantu mengurangi kesibukan orang tua di rumah, atau membantu orang tua untuk ikut mencari sesuap nasi dengan bekerja seadanya. Praktek-praktek seperti ini bagi keluarga dengan pandangan sempit akan menguntungkan, tetapi bagi masa depan anaknya, akan mempunyai akibat fatal dan tidak mungkin memotong rantai kemiskinan secara tuntas.

Dalam Posyandu, proses pemberdayaan itu tidak saja dilakukan oleh para petugas dinas, atau petugas resmi pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat secara luas. Mereka saling belajar dari tetangganya sehingga perubahan sikap dan tingkah laku tidak sulit karena tidak harus menghafal teori tetapi langsung mendalaminya melalui praktek sederhana dengan meniru keluarga lain yang telah berhasil.

Para pimpinan Pemerintah Daerah di Yogyakarta dan Jawa Tengah, setelah membahas dengan sungguh-sungguh berbagai kemungkinan pemberdayaan masyarakat tersebut, sepakat bahwa di kedua propinsi tersebut Posyandu akan dikembangkan menjadi Posyandu Mandiri atau Posyandu Sejahtera yang secara bertahap akan diisi dengan pemberdayaan untuk memungkinkan semua fungsi keluarga dapat dikuasai oleh setiap keluarga dan secara langsung menjadi pola hidup sehari-hari dalam membantu setiap anggotanya meraih peranan yang positif dalam menyongsong masa depan yang lebih sejahtera.



Posyandu yang umumnya dikelola oleh PKK dengan dukungan petugas PLKB dari jajaran Dinas KB dan para bidan dari jajaran Dinas Kesehatan, akan dikembangkan dengan mengundang atau mempersilahkan lembaga-lembaga lain seperti organisasi sosial kemasyarakatan yang bernaung dalam Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) di tingkat Propinsi, Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) di tingkat Kabupaten, atau lembaga lain yang mempunyai kemampuan profesional untuk ikut terjun langsung dalam bidang-bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan keluarga dalam lingkungan Posyandu. Mereka diharapkan dapat membantu memberikan dukungan dan bantuan pencerahan dalam bidang-bidang masing-masing.

Lembaga-lembaga tersebut, yang biasanya memberikan bantuan dan pelayanan dengan “*pendekatan institutional*”, harus mengembangkan pendekatan ganda. *Pertama*, menyempurnakan pendekatan institutional itu dengan makin profesional sehingga bisa menjadi rujukan untuk bidang-bidang atau menangani fungsi-fungsi keluarga yang belum seluruhnya dapat diselenggarakan oleh keluarga masing-masing. *Kedua*, memperkaya pendekatan dan dukungan institutional dengan “*pendekatan kemasyarakatan*” atau “*community approach*” melalui pengiriman konsultan, advokator dan petugas-petugas komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi ke berbagai Posyandu secara reguler.

Setiap organisasi sosial kemasyarakatan diharapkan dapat mencontoh pendekatan para petugas PLKB atau bidan yang selama ini praktis “*telah melatih*” ibu-ibu dan petugas Posyandu lain memahami masalah kesehatan reproduksi, KB, kesehatan anak balita dan ibu hamil, sehingga para anggota Posyandu makin mahir dan mendapatkan kenikmatan dalam pemeliharaan kesehatan dan kesertaan dalam KB.

Organisasi sosial yang biasanya mengasuh para penyandang masalah sosial kemasyarakatan melalui Panti atau organisasi yang diasuhnya dengan baik, diharapkan siap mengirim petugasnya untuk meningkatkan kesadaran dan kemahiran anggota Posyandu untuk mampu mendeteksi anak-anak balita, anak remaja atau penduduk lanjut usia yang mungkin saja mempunyai masalah sosial. Para petugas lembaga sosial itu harus pula bisa mengajarkan keluarga yang menjadi anggota Posyandu untuk sebisa mungkin menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi keluarganya secara mandiri. Kalau penyelesaian oleh setiap keluarga secara mandiri tidak mungkin dilaksanakan, karena ketidak mampuan, atau karena keterbatasan keluarga yang

bersangkutan, maka Posyandu sebagai organisasi gotong royong diharapkan bisa mengajak anggotanya untuk secara sinergi memberikan bantuan dan mencoba memecahkan masalah secara bersama-sama. Pendekatan mandiri ini sangat berbeda dengan pendekatan Panti atau Lembaga Sosial yang segala sesuatunya diatur dan diselesaikan oleh Pengurus Panti atau Pengurus Lembaga Sosial yang bersangkutan.

Apabila penyelesaian dalam Posyandu secara mandiri tidak dapat dilakukan, maka barulah keluarga yang bersangkutan di rujuk ke lembaga lain yang secara profesional mampu membantu menyelesaikan masalah keluarga dan masyarakat itu dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Proses ini seperti menghadapi salah satu anggota keluarga yang sakit. Terlebih dulu diselesaikan dalam lingkungan keluarga, baru kalau tidak mungkin disembuhkan, diantar ke klinik atau dokter yang dapat membantu penyelesaian dengan lebih profesional.

Pendekatan melalui kegiatan dalam Posyandu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Biasanya sebuah keluarga yang mempunyai anggota dengan masalah sosial, seperti cacat atau ada kekurangan fisik, akan cenderung bersifat tertutup. Sikap ini dilakukan untuk menghindari rasa malu atau bersalah, dan biasanya tidak ingin ditolong keluarga lain secara terbuka. Untuk menerima pertolongan biasanya memerlukan kesabaran dan pengertian yang luas sampai keluarga itu merasa yakin bahwa pertolongan yang akan diterimanya itu dilakukan semata-mata sebagai upaya gotong royong jauh dari sifat mempermalukan sesamanya.

Wakil Gubernur DI Yogyakarta maupun Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang ditugasi kedua Gubernur daerah masing-masing untuk

memimpin pertemuan penyegaran dan pengembangan Posyandu secara teknis tersebut, beranggapan bahwa gagasan yang lengkap dan mempunyai daya jangkau jauh kedepan untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh itu, harus segera koordinasikan bersama berbagai instansi terkait. Kedua Wakil Gubernur akan segera melapor kepada Gubernur masing-masing dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait lain di daerahnya. Dalam waktu singkat diadakan pertemuan koordinasi di Yogyakarta dan di Semarang saat Hari Keluarga Nasional tahun 2006 pada akhir bulan Juni 2006, kegiatan Penyegaran Posyandu Mandiri atau Posyandu Sejahtera itu dapat dikembangkan di daerah-daerah secara bertahap.

[



## PAPARAN DESA MEMBESARKAN HATI RAKYAT

**S** ETELAH pertemuan koordinasi antara Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), BK3S Jatim, Yayasan Damandiri, bersama Pemda Jawa Timur dan aparatnya beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, telah memutuskan empat kabupaten yaitu Magetan, Sidoarjo, Jombang dan Lumajang sebagai empat kabupaten model untuk segera bebenah diri. Keberhasilan pengembangan di empat kabupaten ini akan menjadi pelajaran untuk memperluas upaya pengembangan Posyandu ke daerah-daerah lainnya.

Sesuai dengan keputusan tersebut, beberapa waktu lalu, dengan fasilitasi Koordinator Wilayah Madiun, Drs. Tajuddin, telah diadakan pertemuan dengan seluruh jajaran pemerintah daerah di wilayah





Madiun. Hadir pula anggota Muspida dan Wakil-wakil dari DPRD setempat. Pertemuan yang sekaligus membahas masalah keamanan dan ketenteraman masyarakat tersebut berlangsung marak dan menarik banyak perhatian.

Dalam pertemuan tersebut, secara panjang lebar sebagai Ketua Umum DNIKS, sekaligus Wakil Ketua I Yayasan Damandiri, saya mendapat kesempatan memaparkan peranan Posyandu Mandiri sebagai wahana untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Posyandu Mandiri yang disepakati Gubernur Jawa Timur sebagai wahana pemberdayaan

keluarga, wadah bersatunya kekuatan pembangunan dalam membantu pemberdayaan keluarga bisa sekaligus membangun keluarga menjadi kekuatan yang sangat besar. Keluarga yang sejahtera dan bersatu akan merupakan kekuatan bangsa dalam memelihara kesatuan dan persatuan dalam wadah NKRI yang utuh dan kuat. Keluarga pedesaan yang bersatu akan sanggup menangkal segala akibat negatif dari proses globalisasi yang maha dahsyat dan tidak bisa dibendung dengan cara biasa.

Pemaparan tentang Posyandu Mandiri tersebut mendapat sambutan yang sangat memuaskan sehingga tidak satupun kabupaten atau kota di wilayah Madiun merasa tidak perlu mengembangkan Posyandu Mandiri. Setiap kabupaten atau kota nampaknya siap untuk ikut serta dalam pengembangan Posyandu.

Setelah uraian yang panjang lebar tersebut rombongan dari Jakarta dan Propinsi Jawa Timur melanjutkan perjalanan ke Magetan untuk menyaksikan Gelar Posyandu Mandiri di desa Sidomukti. Gelar Posyandu Mandiri di Desa Sidomukti itu dipimpin langsung oleh Bupati Magetan yang gesit Bapak H. Saleh Mulyono dan Ketua Tim Penggerak PKK Magetan, Ibu Saleh Mulyono. Kegiatan di desa dipimpin oleh seorang Camat perempuan yang gesit, Ibu Condrowati, dan Lurah Tikno yang berpengalaman lebih dari delapan tahun.

Paparan lapangan yang dilaksanakan dengan meriah itu berhasil menunjukkan kemampuan masyarakat di desa Sidomukti menterjemahkan pemberdayaan keluarga yang rumit menjadi kegiatan terpadu yang menarik. Posyandu yang biasanya dilayani dengan lima meja untuk kegiatan bidang KB dan Kesehatan telah berubah menjadi

ajang pembangunan keluarga yang paripurna. Pemberdayaan dimulai dari tingkat balita sampai lansia. Anak-anak balita yang pada Posyandu sebelumnya ditimbang dan diberi contoh tentang masukan gizi, pada Posyandu Mandiri mendapat tambahan masukan unsur-unsur yang lebih luas. Cara masyarakat desa memberi informasi sangat menarik, yaitu dengan permainan “wayang boneka” dengan alat peraga yang sederhana. Dua orang “dalang” yang duduk dibelakang layar bercerita dan menggerakkan wayang yang memikat. Bukan saja anak-anak balita bergembira, ibu-ibu yang mengantar ikut pula menikmati permainan si “dalang” di belakang layar yang memikat itu.

Perhatian terhadap ibu hamil diberikan secara luas, termasuk latihan senam yang diikuti dengan penuh perhatian. Umumnya ibu-ibu hamil anak yang pertama. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap keluarga berencana masih tetap tinggi dan tidak terpengaruh oleh adanya krisis dan penyerahan pengelolaan KB ke daerah.

Anak-anak remaja, termasuk penyandang cacat, mendapat perhatian di Posyandu. Penanganan yang serius dilakukan oleh suatu sekolah anak-anak penyandang masalah sosial secara profesional sehingga anak-anak tersebut tidak saja tumbuh dengan gembira tetapi sanggup menyerap kemampuan ketrampilan yang dapat diandalkan. Mereka bisa menunjukkan diri sebagai penyanyi yang baik, pengrajin ayaman dan sepatu, serta mempunyai ketrampilan lain yang membesarkan hati.

Penanganan masalah lansia dilakukan tidak oleh lansia sendiri tetapi dibantu oleh tenaga muda dan anak-anak remaja. Hubungan yang

akrab antara penduduk lanjut usia dengan anak-anak muda membawa kesan yang mendalam bagi lansia. Mereka merasa masih dibutuhkan dan memberikan rasa bangga karena kehidupan yang makin panjang tetap mendapat perhatian dan penghargaan dari generasi yang lebih muda.

Paparan yang menarik itu ditutup dengan temu wicara selama satu jam lebih dengan selingan tarian dan nyanyi. Yang mengharukan adalah bahwa diantara penyanyi yang tampil adalah dua orang gadis tuna netra yang sedang menyelesaikan pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama. Kedua penyanyi yang merdu itu diiringi seorang pemain organ yang ternyata juga seorang tuna netra yang terampil.

Nyanyian yang merdu itu mengundang isak tangis yang sangat mengharukan dari mereka yang hadir, sehingga Bupati Magetan H. Saleh Mulyono yang diminta komentar atas nyanyian yang dibawakan kedua gadis itu tidak kuat menahan keharuan. Bupati yang biasanya tegar, terisak-isak dan tidak sanggup memberikan komentar dalam paparan yang malam ini akan disiarkan secara lengkap dalam acara Semanggi pada TVRI Surabaya. Karena itu sebagai penghargaan kepada ketiga seniman tuna netra tersebut, secara spontan Ketua Umum DNIKS menyumbang uang tabungan masing-masing Rp. 5.000.000,- untuk melanjutkan pendidikan.

Paparan yang ditayangkan dalam acara Semanggi malam ini di TVRI Surabaya diharapkan menjadi contoh Posyandu Mandiri sebagai wahana pemberdayaan keluarga secara paripurna.

[

### 3 Misi Yayasan Damandiri untuk Magetan

#### *Reportase Majalah Gemari Edisi 62/VII/2006*

**S** AAT melakukan kunjungan ke sejumlah home industri di kecamatan Plaosan, Magetan, Jawa Timur, Wakil Ketua I Yayasan Damandiri Prof DR H Haryono Suyono didampingi Bupati Magetan Drs Saleh Muljono, MM, sepakat akan mengembangkan sumber daya manusia melalui bantuan kredit dari Damandiri. "Kalau perlu, dana yang tersisa dari Takesra, Kukesra dan kredit keluarga miskin lainnya yang pernah diluncurkan Yayasan Damandiri kita kembalikan lagi ke Kabupaten Magetan bahkan ditambah dana segar agar bisa menolong keluarga kurang mampu," tukasnya.

Kabupaten yang berada tepat di kaki Gunung Lawu ini memang memiliki kendala bagaimana membuka keterisolasian, dimana akses masuk dan keluar sangat terbatas. Tak mengherankan bila potensi keseluruhan di Kabupaten Magetan masih tertinggal dari kabupaten lain di sekitarnya, baik industri kecil,

*industri pariwisata, pendidikan dan kesehatan.*

*Itu sebabnya, kehadiran Prof Haryono ke Magetan yang sebenarnya membawa tiga misi Yayasan Damandiri untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Magetan di bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan mendapat sambutan cukup antusias. Dari hasil kunjungan sehari ke pengrajin sepatu kulit, kain batik, industri kue bolu dan jenang, Prof Haryono pun sempat mempertanyakan hasil dan omzet penjualan layaknya seorang reporter.*



*“Kita sudah sepakat dengan pak Bupati untuk membantu pemberdayaan SDM melalui 3 kegiatan pokok,” cetus Prof Haryono yang tak segan-segan mencicipi bolu dan jenang khas Magetan disela proses pembuatan dan membeli sejumlah kain batik Mukti Rahayu yang dipamerkan pada kaca etalase milik Bu Sri.*

*Pertama, dibidang kesehatan akan menempatkan bidan-bidan di pedesaan agar bisa menghidupkan kembali posyandu dan bisa praktek secara mandiri sekaligus membantu mereka-mereka yang kurang mampu untuk praktek secara mandiri. Agar para bidan bisa mengikuti pendidikan sampai jenjang D-3 sebagai prasyarat praktek mandiri, Yayasan Damandiri akan membantu memberikan kredit dengan bunga 12 persen.*

*Kedua, dibidang pendidikan akan menunjuk dua SMA untuk dikembangkan seakan-akan seperti SMK. Maksudnya, bagi siswa kurang mampu akan di berikan ketrampilan-ketrampilan dan dititipkan di sekolah-sekolah atau usaha-usaha di Kabupaten Magetan. “Ancang-ancang kami, apabila kegiatan ini bisa dilakukan, maka sekitar 3-4 tahun ke depan, seluruh siswa kelas 3 di sekolah tersebut bisa mendapatkan ketrampilan sebagai bekal apa bila tidak melanjutkan ke perguruan tinggi bisa menjadi pengusaha, ahli bengkel, tata boga dan lain-lain.”*

*Ketiga, Yayasan Damandiri akan membantu pemerintah dalam mengembangkan wirausaha. Sisa dana dana Takesra, Kukesra, kredit keluarga miskin dan sebagainya yang dikumpulkan melalui Bupati setelah dikembalikan lagi kepada Yayasan Damandiri, akan dikembalikan lagi ke Kabupaten Magetan untuk tetap dipakai menolong keluarga kurang mampu. “Kalau perlu kita akan tambah dengan dana-dana segar agar bisa menolong keluarga kurang mampu yang sekarang sudah dibina oleh kelompok PKK atau kelompok lain dibawah bimbingan pak Bupati.”*

### ***Magetan, Potensi Daerah yang Harus Terus Digali***

*Menurut Saleh Mulyono, persoalan umum yang dihadapinya adalah belum adanya sebuah lembaga perguruan tinggi negeri di Magetan, sehingga jika warga hendak kuliah harus keluar dari wilayah yang cukup jauh. "Mudah-mudahan Universitas Merdeka yang sudah memiliki 5000 mahasiswa dapat dijadikan universitas negeri."*

*Kabupaten yang berada paling barat di provinsi Jawa Timur di kaki Gunung Lawu dengan ketinggian 660 – 1360 dpl dan luas wilayah 688,85 Km, terbagi dalam 16 kecamatan dan 235 desa/kelurahan yang didiami kurang lebih 685.000 jiwa sebenarnya memiliki potensi pertanian dan pariwisata yang sangat diunggulkan.*

*"Guna mempercepat akses komunikasi dan memancing investor datang ke Magetan, kami berharap Lapangan Terbang Iswahyudi, bisa untuk penerbangan sipil," kata Saleh. Untuk pemberdayaan UKM, ungkap Saleh, ada 491 kelompok yang sudah mendapatkan bantuan modal dan ada 364 kelompok yang belum tersentuh. Mengenai persoalan bidan desa yang berjumlah sekitar 400 orang diakui masih berpendidikan D1 dan D2. Bahkan mayoritas bidan desa tidak mampu praktik karena keterbatasan sarana prasarananya.*

*Sementara itu Ir Suroso, AVP. Manager UKKM Bank Bukopin Cabang Solo mengatakan, untuk pengembangan industri kecil dan pariwisata sudah dilakukan penjajakan di Kabupaten Magetan dengan kerjasama antara Pemda Magetan, Yayasan Damandiri dan Bank Bukopin. Skala kredit yang akan dilaksanakan di Kabupaten Magetan adalah kredit dibawah 50 juta. Dengan bantuan kredit ini diharapkan potensi usaha kecil dan menengah bisa berkembang.*

*“Contohnya, kerajinan kulit yang ada disini cukup bagus untuk kita kembangkan, apalagi pasar kulit banyak dibutuhkan baik oleh pribadi seperti sepatu, tas, dan jaket maupun industri ini yang akan menjadi prioritas. Kemudian dengan perkembangan swamitra di Solo yang cukup baik kita juga akan mengkopi sekitar 5 swamitra untuk dikembangkan di Kabupaten Magetan. Untuk bidang pendidikan, Bank Bukopin akan membantu penyaluran beasiswa kepada siswa kurang mampu seperti yang telah dilakukan selama ini di Solo,” paparnya penuh semangat.*

*Usaha-usaha yang ada di wilayah Kabupaten Magetan selama ini memang hanya terlihat di kota Madiun atau daerah-daerah di luar kota Magetan. Seperti industri penyamakan dan pengolahan kerajinan kulit, anyaman bambu, gamelan (alat musik tradisional), makanan tradisional serta pariwisata sebenarnya sudah ada di Magetan, tapi orang lebih sering menjumpai di Madiun. Karena sebelumnya kabupaten Magetan dikenal sebagai kantor pembantu bupati Madiun.*

*Dengan kerjasama atau kesepakatan pemerintah daerah Kabupaten Magetan dengan Yayasan Damandiri diharapkan pengembangan Sumber Daya Manusia dapat terwujud. Semoga! IR/RW*

[



## HADIAH BUKU UNTUK ANAK BALITA DI POSYANDU

**B**EBERAPA waktu yang lalu, dalam rangka ulang tahun Perpustakaan Nasional di Jakarta, Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan kunjungan ke lembaga yang sangat penting tersebut. Dalam kunjungan itu Presiden menyerukan agar gerakan membaca buku dan mencintai perpustakaan segera digerakkan untuk membudayakan kebiasaan membaca buku dan mengantar setiap anak bangsa menguasai ilmu pengetahuan yang terkandung dalam banyak buku yang tersedia dalam berbagai perpustakaan. Budaya baca akan mengantar anak bangsa menjadi cerdas dan mampu mengantar bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera.

Seruan Presiden itu ditindak lanjuti oleh Klub Perpustakaan Indonesia (KPI) yang minggu lalu mengadakan Temu Karya Nasional

di Jakarta. Acara yang digelar di gedung yang sama sempat dibuka oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, dihadiri oleh Kepala Perpustakaan Nasional dan banyak ahli dalam berbagai bidang. Hadir pula Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang secara khusus menyempatkan diri untuk memberi dorongan kepada para Pustakawan agar bisa memberikan perhatian dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada kaum perempuan. Dengan pelayanan melalui perpustakaan itu kaum perempuan bisa menikmati bacaan yang tersedia sebagai bekal untuk meraih masa depan yang lebih sejahtera.

Temu Karya Nasional juga mendengarkan paparan dari ahli-ahli lain yang intinya mengharapkan para pustakawan yang hadir dan jumlahnya melebihi 120 orang, berasal dari seluruh Indonesia tersebut, bersikap optimis dan proaktif, artinya tidak hanya menyediakan buku di ruang perpustakaan yang ber-AC, tetapi mengantar buku-buku yang dibutuhkan masyarakat luas, mahasiswa, guru, dan siswa-siswa di sekolah atau tempat lain yang dipilih oleh pembacanya. Bahkan, diharapkan perpustakaan umum atau perpustakaan sekolah di kabupaten dan kota, dapat menjadi pendukung pelayanan masyarakat dalam lingkungan Posyandu, pusat Pelayanan Terpadu, di pedesaan, yang akhir-akhir ini dianjurkan Presiden untuk disegarkan dengan kegiatan pemberdayaan yang makin bervariasi.

Menempatkan Posyandu sebagai titik sentral kegiatan perpustakaan di lapangan membawa manfaat ganda dengan variasi pelayanan pembangunan yang menarik. Manfaat pertama adalah bahwa Posyandu bisa menjadi ajang untuk gerakan peningkatan minat baca yang efektif, termasuk upaya pemberantasan buta aksara diantara anggota Posyandu. Pemberantasan buta aksara bisa dikembangkan

dengan sangat efektif karena Posyandu Mandiri atau Posyandu Plus yang sedang dikembangkan menempatkan pemberdayaan manusia mulai sangat dini, dalam kandungan ibunya, sampai kepada penduduk lanjut usia. Kepada sasaran yang berbeda beda tersebut pelayanan buku dari perpustakaan untuk para anggota Posyandu juga harus berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan sarannya.

Pelayanan buku untuk Posyandu bisa merupakan kegiatan yang menarik karena perpustakaan dapat datang dan mengantar buku bacaan dengan variasi yang menarik. Suatu hari perpustakaan bisa datang mengantarkan buku bacaan untuk anak balita. Hari lainnya bisa datang untuk anak remaja. Hari lain lagi bisa datang untuk anak dewasa. Dan hari lainnya bisa datang untuk penduduk lanjut usia. Kedatangan hantaran buku dengan variasi yang berbeda beda tersebut dapat menarik minat dan menghasilkan partisipasi para pembaca yang menarik pula.

Karena perpustakaan mungkin saja mempunyai kumpulan buku yang terbatas, hantarannya tidak harus datang dengan bahan bacaan secara serentak. Hantaran dapat diatur begitu rupa sehingga memberi manfaat informasi melalui buku yang dibutuhkan anggota pada saat yang tepat. Dengan penelitian kebutuhan yang seksama, "*gengsi*" perpustakaan sebagai lembaga siap melayani dapat dipertahankan. Bahkan perpustakaan yang mungkin saja menghantarkan "*bahan yang tidak laku pinjam*", akan segera berubah menjadi lembaga perpustakaan dengan bahan yang sangat dibutuhkan dan dinantikan kedatangannya oleh khalayak ramai.

Kebiasaan dan kerajinan orang tua membaca buku bisa memberi inspirasi dan semangat anak-anaknya untuk juga gemar membaca buku.

Kebiasaan itu harus dilakukan dengan sistem yang terbuka dan menyenangkan sehingga anak-anak dalam suatu keluarga ikut serta menikmati kebiasaan orang tua membaca buku secara menarik. Proses mengembangkan kebiasaan itu menjadi budaya baru dalam lingkungan keluarga, dan akhirnya berkembang menjadi budaya masyarakat yang luas.

Salah satu cara yang menarik dalam proses pemberdayaan itu adalah menjadikan kebiasaan membeli dan memberi buku untuk berbagai peristiwa, baik dalam lingkungan keluarga atau dalam peristiwa lain di masyarakat. Kebiasaan memberi buku bisa dilakukan kepada seorang ibu yang sedang mengandung agar ibu dan keluarganya mempelajari berbagai pengetahuan tentang bayi yang akan lahir dalam lingkungan keluarganya. Buku-buku itu bisa saja berisi petunjuk tentang apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Bahkan ada juga buku-buku yang menganjurkan agar janin dalam perut ibunya mulai pula diputarkan kaset atau CD lagu-lagu tertentu untuk merangsang dan mengembangkan pertumbuhan janin yang sehat. Isi buku dan petunjuknya sekaligus menjadi perangsang upaya dalam memperkenalkan isi buku dan kandungan luhur yang ada di dalamnya kepada janin secara dini, memperkenalkan kepada janin hembusan merdu makna luhur melalui suara yang terekam dalam kaset atau CD, disamping dalam bentuk buku yang dibacakan oleh ibu bapaknya dengan penuh kasih sayang.

Begitu seorang bayi dilahirkan, para sahabat bisa saja memberi sumbangan buku kepada ibu yang sedang berbaring bahagia bersama bayinya. Bahan bacaan itu bisa menjadi teman akrab dari ibu yang bersangkutan dalam menyusui anaknya. Seorang bayi yang melihat

ibunya membaca dan memperhatikan roman muka yang penuh kebahagiaan tentunya akan mencatat dengan sungguh-sungguh apa yang dilihat dan dirasanya. Catatan itu akan menjadi bahan yang terpatri sangat kuat dalam memori bayi yang bersangkutan.

Pada saat tumbuh kembang bayi, menjadi anak batita, usia menjelang tiga tahun, seorang ibu seyogyanya secara terus menerus diberi oleh-oleh berupa buku yang berisi cerita atau kandungan isi, dongeng, dan lainnya, yang menarik. Ibu yang bijak dan kasih sayang kepada anaknya, setiap saat dapat membacakan dongeng yang terkandung dalam buku kepada bayinya. Praktek membacakan buku yang disertai senyum penuh kasih sayang, dramatisasi begitu rupa bisa memberi kenangan tersendiri kepada bayi agar apabila tumbuh besar, bisa membekas dan menghasilkan kebiasaan baru yang penuh kasih sayang kepada orang tua yang membacakan cerita menarik tersebut. Kebiasaan seorang ibu membaca cerita untuk bayinya itu akan dikenang dan menimbulkkan budaya baca yang lebih lestari.

Buku dapat pula diberikan kepada anak-anak remaja dalam Posyandu sebagai sumber untuk menambah ilmu dan pengetahuan yang segera dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan kesempatan kepada anak muda untuk membaca dan mencari referensi dari buku-buku yang tersedia atau diantarkan oleh perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah di sekitar Posyandu, akan menimbulkan kepercayaan dan kebiasaan baru bahwa buku bisa menjadi referensi yang dapat dipercaya. Buku dapat menjadi referensi yang tidak pilih kasih karena buku dan isinya harus jujur dan dapat dipertanggung jawabkan. Buku tidak bisa memilih pembacanya, bersifat pilih kasih atau mengubah isi sesuai dengan selera pembacanya. Buku

akan tetap konsisten dan memberi tanpa pandang bulu.

Karena itu pemberian buku kepada generasi muda memberi kemungkinan untuk maju dalam keadilan. Lebih-lebih lagi kalau ada keluarga lain yang mampu dan mempunyai kelebihan, dapat membagi kelebihan itu untuk membantu mendampingi penduduk lain yang tidak mampu membaca atau mengambil inti sari dari buku yang tersedia. Pendamping generasi muda yang membacakan buku itu akan menumbuhkan kebersamaan dan kedamaian diantara sesama generasi muda. Budaya kebersamaan ini akan menumbuhkan persatuan dan kesatuan dalam kelompok kecil, dan kalau diperlihara terus secara konsisten, akan menumbuhkan kebersamaan sesama anak bangsa dengan cakupan yang lebih luas.

Proses bacaan untuk generasi muda bisa juga dibantu oleh generasi yang lebih tua atau lansia. Buku-buku yang menjadi simpanan generasi tua dapat dipinjamkan melalui kegiatan dalam lingkungan Posyandu kepada generasi yang lebih muda. Peminjaman tersebut sekaligus merupakan penghargaan terhadap orang tua atau sesepuh yang ternyata banyak memberikan peninggalan ilmu pengetahuan melalui keikhlasan meminjamkan buku yang menjadi milik pribadinya. Sebaliknya anak-anak muda dan remaja dapat menghargai kebaikan itu dengan memperlakukan buku yang dipinjamnya dengan penuh kasih sayang dan kehati-hatian agar menumbuhkan rasa saling menyayangi.

Lembaga perpustakaan dapat dikembangkan secara bertahap. Perpustakaan Sekolah dapat dikembangkan dengan menampung buku-buku yang dipergunakan oleh siswa yang lulus. Nama-nama siswa dicantumkan dalam buku yang diwariskan kepada adik-adik kelasnya

melalui Perpustakaan Sekolah. Guru-guru juga bisa menempatkan buku bacaannya di Perpustakaan Sekolah. Para orang tua dapat meminjamkan atau menyerahkan buku yang sudah di bacanya kepada Perpustakaan Sekolah. Disamping itu para siswa dapat saja mengadakan gerakan kemasyarakatan untuk mengundang penyumbang buku untuk sekolahnya.

Apabila perpustakaan di suatu sekolah mempunyai kelebihan buku karena lingkungan yang sangat kondusif, sekolah tersebut dapat menyumbang buku kepada sekolah lain yang jauh dan terpencil. Dengan cara itu dapat dikembangkan kerjasama antar sekolah yang bisa memupuk rasa solidaritas antar anak bangsa.

Perpustakaan Umum di suatu kabupaten atau kota dapat dikembangkan dengan menyelenggarakan lomba resensi buku atau bedah buku bersama penerbit atau pengarang buku. Bahkan Bupati atau Walikota dapat diundang bersama Muspida setempat untuk memulai bedah buku tersebut secara rutin. Acara itu sekaligus dapat disertai kegiatan sumbangan buku dari penduduk setempat, baik buku baru maupun buku-buku yang selesai dibaca oleh keluarga yang bersangkutan. Dengan cara demikian pembelian buku oleh masyarakat berjalan lancar dan Perpustakaan Umum di suatu kabupaten atau kota dapat menjadi fasilitator yang menambah koleksi buku dan bahan-bahan bacaan dari sumbangan masyarakat dan penerbit di sekitarnya.

Lomba baca buku itu dapat diikuti dengan menggelar berbagai atraksi lain yang menarik. Misalnya lomba baca cepat dan memahami bahan yang dibaca. Kegiatan seperti ini bisa dirangsang dengan menyediakan hadiah-hadiah menarik, misalnya merebut Piala Bupati

atau Walikota setempat. Bahkan bisa ditingkatkan untuk merebut piala Gubernur, Wakil Gubernur atau bahkan Piala Presiden dan Wakil Presiden RI. Upaya ini menjadi perangsang untuk membangun budaya baca yang bermakna.

Kebiasaan timbal balik dalam suasana saling menghargai itu akan menumbuhkan suasana tenteram dalam kebersamaan sesama anak bangsa dan mengantar kehidupan di pedesaan penuh kedamaian dan ketenteramaan. Insya Allah.

[



## GOTONG ROYONG MEMBANGUN KELUARGA

**P**ERINGATAN Hari Keluarga Nasional tahun ini, tanggal 29 Juni 2006 lalu, yang dipusatkan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari catatan demografi, Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang terhitung padat penduduk dengan struktur piramida muda. Karena itu jumlah penduduk usia muda yang terdiri dari pasangan usia subur dengan jumlah anak balita cukup besar, masih sangat melimpah. Jumlah pasangan muda dengan anak balita itu bukan karena Kabupaten Bogor tidak berhasil dalam program KB, tetapi keberhasilan KB-nya tidak istimewa, bahkan keberhasilan ini ditambah keunikan lain yang tidak dimiliki kabupaten lainnya di Jawa Barat. Kabupaten Bogor berdekatan dengan Ibu Kota RI, Jakarta, yang mempunyai tenaga kerja, yang umumnya muda, yang harus ditampung dalam kehidupan keseharian dengan keluarganya di daerah yang relatif

lebih murah.

Struktur penduduk Kabupaten Bogor yang menampung banyak penduduk muda bermukim itu mengharuskan kabupaten Bogor memberi kesempatan kehidupan keluarga dengan segala kebutuhannya. Keluarga muda memerlukan perawatan kesehatan yang optimal, kesempatan pendidikan yang luas, dan kesempatan kerja bagi anggota keluarga yang tidak memperoleh kesempatan yang sama di Ibukota Jakarta.

Kalau kepala keluarga bekerja di Jakarta, isteri dan adik-adiknya, yang berasal dari seluruh tanah air, harus pula mendapat pekerjaan yang memadai untuk hidup layak, atau untuk menambah penghasilan kepala keluarga yang berjuang di Ibukota Jakarta. Karenanya, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang disediakan untuk masyarakat Bogor bukan saja disediakan untuk penduduk Bogor dan anak-anaknya, tetapi juga keluarga migran yang umumnya mempunyai anak-anak dibawah usia limabelas tahun. Keluarga migran muda tersebut memerlukan fasilitas pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai ke sekolah menengah atas, bahkan sampai perguruan tinggi.

Kabupaten Bogor juga sarat dengan berbagai fasilitas sekolah dan perguruan tinggi yang cukup besar. Kabupaten Bogor harus menampung anak-anak muda yang bersekolah di IPB atau Perguruan Tinggi lain yang cukup terkenal di Bogor. Mereka tidak seluruhnya tinggal di kota Bogor, tetapi banyak yang memilih tinggal di wilayah kabupaten yang relatif lebih murah. Adanya anak muda yang bersekolah atau kuliah tersebut menambah sifat muda dari struktur penduduk kabupaten Bogor, yang tanpa tambahan itupun masih tergolong kabupaten dengan struktur



penduduk muda.

Dengan pelatihan dan dukungan yang memadai, struktur penduduk muda memberi kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengembangkan lapangan kerja yang luas, dalam industri pertanian, jasa atau kegiatan ekonomi lain yang dapat menunjang kehidupan yang sejahtera. Salah satu yang sudah berkembang adalah pemukiman bagi masyarakat yang bekerja di Jakarta dan sekitarnya. Pelayanan keluarga pekerja tersebut memerlukan dukungan usaha kerakyatan dengan warung-warung di pedesaan yang menyediakan sembako atau kebutuhan sehari-hari dengan harga murah dan siap pakai. Pelayanan yang diberikan harus bisa bersaing dengan banyak sekali toko serba ada, atau mall, yang dibangun besar-besaran tanpa memikirkan usaha kecil dan menengah yang mestinya bisa dikembangkan di seluruh pelosok kabupaten Bogor.

Karena sifatnya pemukiman keluarga pekerja, fasilitas perumahan

penduduk pada umumnya harus dikembangkan akrab dengan lingkungan, memenuhi syarat-syarat kesehatan, dan menjamin agar keluarga asli atau keluarga migran dapat hidup rukun dan terjamin kesehatannya. Mereka akan menjadi atau menyaksikan keluarga yang mobilitasnya tinggi karena setiap hari harus bekerja di luar kota. Mereka tidak boleh sakit, baik penyakit yang berbahaya untuk dirinya sendiri, atau menjadi pembawa penyakit yang dapat menular kepada teman sekerjanya. Karena itu upaya pemeliharaan kesehatan penduduk menjadi lebih besar skalanya, kabupaten Bogor memelihara kesehatan keluarga karyawan DKI Jakarta yang bermukim di desa-desanya.

Untuk itu Kabupaten Bogor dapat saja mengadakan kerjasama dengan pabrik atau perusahaan dimana banyak penduduknya bekerja. Perusahaan atau pabrik-pabrik tersebut diajak ikut membantu pembangunan pelayanan kesehatan untuk rakyat di pedesaan di Kabupaten Bogor. Pada tingkat pertama perusahaan-perusahaan tersebut diajak bekerja sama melakukan revitalisasi Posyandu dan pengembangan Posyandu Mandiri untuk melayani masyarakat luas di pedesaan.

Perhatian lain yang perlu dikembangkan adalah membangun sekolah-sekolah unggul untuk anak dan remaja yang orang tuanya pekerja sebagai buruh rendahan di kota, serta anak-anak keluarga kurang mampu, agar mereka bisa memperoleh pendidikan yang bermutu. Pelayanan pendidikan bermutu merupakan satu-satunya jalan untuk memotong rantai kemiskinan. Hanya dengan kualitas pendidikan yang unggul anak dan remaja dari keluarga kurang mampu bisa memperoleh kesempatan mentransformasikan dirinya dari keadaan kurang mampu menjadi makin mampu secara mandiri. Kalau orang tua mereka terpaksa

harus bekerja setiap hari, bahkan menghabiskan waktu yang sangat lama di jalan, berangkat sebelum subuh karena mengejar kereta api, atau transportasi pagi, agar tidak terlambat di kantor atau pabriknya di Jakarta. Atau pulang tengah malam karena alasan transportasi, anak-anak mereka mungkin saja bisa lebih santai, tidak menghabiskan waktu di jalanan, dan sebagai bapak atau ibu, bersama-sama secara gotong royong membangun keluarga sejahtera di tempat tinggalnya dengan penuh kasih sayang.

Karena itu, pembangunan fasilitas pendidikan unggul di kabupaten Bogor harus diarahkan untuk melayani anak-anak keluarga kurang mampu yang bersekolah, atau anak-anak keluarga migran, bukan sekedar bisa ikut bersekolah, tetapi benar-benar memperoleh ilmu pengetahuan yang tidak saja cocok dengan masa depannya, tetapi juga mendapat latihan ketrampilan yang menjamin penawaran dan nilai jual yang lebih tinggi di pasaran yang makin kompetitif. Sekolah-sekolah unggul bukan sekedar unggul secara akademis, tetapi unggul karena menghasilkan anak dan remaja yang bisa terjun kembali ke masyarakat dengan percaya diri, bersemangat dan mampu bersaing dengan tenaga-tenaga lain yang melimpah di pasar kerja.

[